

MENGELOLA KAMPUNG DENGAN KEARIFAN LOKAL

Belajar dari Kampung Gampingan di Yogyakarta

Sidhi Pramudito

Staf Pengajar Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik

Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Jl. Babarsari 44 Yogyakarta

E-mail: sidhi_pramudito@mail.uajy.ac.id, sidhipramudito@gmail.com

***Abstract:** In recent years many new and modern buildings have emerged in Yogyakarta, on the other hand the existence of kampongs and the natural environment continues to decline, including local wisdom in managing the environment is increasingly abandoned. Kampung Gampingan as a "kampung kota" in the city of Yogyakarta, located on the riverside of the Winongo River. Kampung administrators and it's citizen Gampingan cooperate to manage and maintain the quality of the kampong environment. For them, the aspect of environmental conservation is very important and considered because it aims to maintain harmonious relationships between humans and the natural environment. The purpose of this paper is to explore information about environmental management in kampong Gampingan, which involves citizens and consider the impact on the natural environment. The results show that community participation, partnerships with various parties (other communities, universities, government and private), and the role of facilitators are very important in the management of kampong based on local wisdom. Community participation is the key to the success or failure of kampong management based on local wisdom.*

***Keywords:** kampong management, community participation, local wisdom*

***Abstrak:** Dalam beberapa tahun akhir-akhir ini banyak bangunan baru dan modern muncul di Yogyakarta, pada sisi lain keberadaan kampung dan lingkungan alamiah terus berkurang, termasuk kearifan lokal dalam mengelola lingkungan semakin ditinggalkan. Kampung Gampingan termasuk "kampung kota" di kota Yogyakarta, terletak di tepi Sungai Winongo. Pengurus kampung dan warga kampung Gampingan bergotong-royong mengelola dan menjaga kualitas lingkungan kampung. Bagi mereka, aspek pelestarian lingkungan sangat penting dan diperhatikan sebab bertujuan menjaga hubungan harmonis manusia dan lingkungan alam. Tujuan tulisan ini adalah menggali informasi tentang pengelolaan lingkungan di kampung Gampingan, yang melibatkan warga dan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan alam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat, kemitraan dengan berbagai pihak (komunitas lain, perguruan tinggi, pemerintah dan swasta), dan peran fasilitator sangat penting dalam pengelolaan kampung yang berbasis kearifan lokal. Peranserta masyarakat menjadi kunci keberhasilan atau kegagalan pengelolaan kampung berbasis kearifan lokal.*

***Kata kunci:** mengelola kampung, partisipasi warga, kearifan lokal*

PENDAHULUAN

Dinamika pembangunan perkotaan, baik secara fisik maupun non fisik, mempunyai pengaruh baik dan buruk terhadap lingkungan. Jumlah penduduk yang terus meningkat berdampak pada semakin berkurangnya lahan permukiman, ruang hijau, dan area terbuka. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka pembangunan lingkungan kota terus dilakukan, namun sering terjadi pola pembangunan yang

mengabaikan dampak lingkungan sekitarnya. Pembangunan kota merupakan konsekuensi dari pemenuhan kebutuhan masyarakat, bahkan sampai merambah area tepian sungai.

Penggunaan kawasan tepian sungai sebagai area bermukim menjadi persoalan yang sering ditemui pada kawasan perkotaan. Kawasan tepian sungai menjadi area yang berpotensi kumuh bila tidak dikelola dengan baik. Mutu air sungai terganggu, estetika lingkungan pun terkena dampak.

Selain aspek fisik, pembangunan modern juga berdampak pada aspek non fisik kota. Keberadaan kampung-kampung kota yang merupakan “wajah asli” kota semakin terpinggirkan oleh pembangunan modern. Hal ini juga berdampak pada suasana dan keberlanjutan kehidupan masyarakat. Pada dasarnya, karakter kampung adalah unik. Keberagaman atau ketidakseragaman, pola organik, dan karakter masyarakatnya sering kali menjadi persoalan yang “mengejutkan”, diluar kreativitas arsitek sekalipun.

Awalnya, permukiman di kota Yogyakarta tumbuh di sekitar keraton. Dalam perjalanan sejarah, kampung berkembang merambah sampai ke area-area tepian sungai yang ada di kota Yogyakarta. Akibatnya, kota Yogyakarta memiliki karakter unik dari keberadaan kampung kotanya. Namun karakter tersebut kini terancam hilang jika arah pembangunan tidak diimbangi dengan pemikiran mengenai kelestarian lingkungan.

Diperlukan langkah-langkah “arif” dalam menyatukan ide rancangan dan lingkungan sekitar, sehingga hasil rancangan merupakan sebuah karya yang berkelanjutan (*sustainable*). Keberlanjutan sebuah rancangan dapat terjadi apabila dalam proses dan hasilnya mengakomodasi permasalahan dan potensi lokal. Dengan demikian pendekatan berbasis partisipasi masyarakat (*community based development*) sangat diperlukan agar karya rancangan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, karakter lingkungan, dan kehendak masyarakat.

Pemahaman dan pertimbangan dalam melihat potensi lokal dalam wujud penerapan kearifan lokal perlu dilakukan sebagai wujud pengakomodasian aspek fisik dan non fisik lokal dalam perkembangan kota. Permasalahannya adalah: Bagaimana menyatukan ide rancangan dengan lingkungan sekitarnya.

Kampung Gampingan di kota Yogyakarta merupakan salah satu kampung yang dilalui Sungai Winongo. Kondisi ini merupakan situasi yang khas pada kampung tersebut. Upaya pelestarian lingkungan menjadi sangat penting,

karena sebagian besar warga menganggap sungai sebagai “area buangan”. Problemanya adalah: Bagaimana memperlakukan sungai dan kawasan sekitar menjadi satu kesatuan ruang yang harmonis sesuai dengan lokalitasnya.

Kesadaran akan pentingnya menjaga dan mengelola kawasan tepian sungai sudah mulai muncul. Masyarakat berpartisipasi dan terlibat bersama-sama dengan Forum Komunikasi Winongo Asri (FKWA) berupaya membangun perilaku yang “arif” dalam mengelola lingkungan sungai dan kampung.

Tujuan dari model partisipatif masyarakat adalah menumbuhkan sikap dan rasa memiliki lingkungan oleh masyarakat, sehingga tercipta lingkungan yang asri dan bersih. Selain itu diharapkan terjadi peningkatan kesejahteraan ekonomi warga yang berakibat pula kegiatan pengelolaan lingkungan menjadi berkelanjutan. Untuk mencapai kondisi tersebut dibutuhkan kemauan, ketekunan, kecintaan, kerelaan, kepedulian, bahkan juga tenaga, waktu, dan dana yang harus selalu dipupuk.

KAJIAN PUSTAKA

Kearifan Lokal dalam Mengelola Kampung

Kearifan (*wisdom*) berarti kemampuan seseorang dalam menggunakan akal pikiran untuk menyikapi sesuatu kejadian, obyek, atau situasi. Terminologi lokal menunjukkan ruang interaksi suatu peristiwa atau situasi terjadi. Definisi kearifan lokal menurut Ernawi (2009), kearifan lokal atau sering disebut *local wisdom* adalah usaha manusia dengan menggunakan akal budi untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, obyek, atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu. Secara umum kearifan lokal muncul melalui proses internal yang panjang dan berlangsung turun-temurun sebagai akibat interaksi antara manusia dengan lingkungan. Lingkungan binaan dalam tulisan ini adalah kampung, suatu bentuk pengelolaan, pengolahan yang dilakukan manusia atau sekelompok manusia sebagai suatu entitas budaya tertentu untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Lingkungan binaan (kampung) sebagai

suatu kesatuan entitas budaya yang di dalamnya terkandung unsur-unsur manusia, alam, serta perwujudan budaya fisik (termasuk arsitektur), maka pemaknaannya harus mengikuti kompleksitas unsur-unsurnya (Wikantiyoso, 2009). Artinya dalam mengelola lingkungan binaan (kampung) hendaknya selalu diperhatikan keberadaan unsur-unsur (potensi dan masalah), sehingga produk yang dihasilkan merupakan jawaban yang khas sesuai lokalitas.

Dalam konteks pembangunan masa kini, berbagai kajian telah diketahui, potensi kearifan lokal merupakan unsur yang harus dipertahankan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Saat ini sudah muncul perubahan konsep perencanaan dan perancangan lingkungan binaan yaitu dengan mengakomodasi konsep kearifan lokal untuk mengangkat potensi lokal kawasan. Perubahan konsep perencanaan dan perancangan lingkungan binaan mulai membuka peluang untuk terakomodasikannya potensi lokal melalui pendekatan partisipatif.

Pendekatan partisipatif (*community based development*), merupakan salah satu strategi yang menjembatani potensi lokal dan tantangan pembangunan masa kini. Dengan pendekatan ini, pembangunan diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi (*economic based*) dan keberlanjutan pembangunan (*socio – ecological based*). Menurut Wikantiyoso (2009), ada tiga orientasi dalam perancangan kota yaitu (1) *development orientations*, (2) *conservation orientations*, dan (3) *community orientations*. Ketiga orientasi tersebut merupakan unsur dasar kebijaksanaan yang harus diperhatikan dalam perancangan kota.

Pendekatan Partisipatif pada Pengelolaan Kampung

Predikat "partisipatif" disini menunjuk pada prinsip hubungan kesetaraan dan kebersamaan antara 'pihak luar-komunitas' (pemerintah, pengusaha, LSM, Perguruan Tinggi) dan "komunitas", dengan mengandalkan pola hubungan "subyek dan subyek" yang bersifat dua-arah dan demokratis (komunikatif). Jadi berbeda dengan manajemen konvensional yang

mengandalkan pola hubungan "subyek dan obyek" (manajer dan kelompok sasaran) (Saharudin, 2006).

Pengembangan kelembagaan pembangunan berbasis masyarakat pada dasarnya dirancang untuk pengembangan komunitas-komunitas dalam sebuah kawasan yang bertujuan untuk:

1. Mendorong pembangunan ekonomi komunitas yang memiliki fokus sesuai kapasitas ruang dan potensi komunitas,
2. Memfasilitasi munculnya pusat-pusat pertumbuhan antar komunitas,
3. Memberdayakan komunitas agar dapat menggali, mendayagunakan dan melestarikan potensi-potensi yang ada untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat (komunitas),
4. Mendorong usaha-usaha ekonomi rakyat yang memiliki *link* yang kuat dengan basis dan potensi kawasan perkomunitasan dan memfasilitasi akses produksi usaha rakyat terhadap pasar,
5. Mengembangkan kapasitas manajemen usaha ekonomi rakyat dan kelembagaan keuangan mikro kawasan perkomunitasan,
6. Memfasilitasi penguatan partisipasi pemerintah komunitas dan kelembagaan masyarakat komunitas serta masyarakat dalam proses kebijakan publik lokal dalam kaitannya dengan pembangunan dan pengembangan kawasan bantaran sungai (Nasdian, 2006 dalam Sri Suminar 2011).

Dalam penelitian ini yang menjadi sasaran adalah komunitas/masyarakat di kampung Gampingan, RT 46/RW 10, Kota Yogyakarta.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan metode kunjungan lapangan dan wawancara serta observasi lapangan. Kunjungan lapangan bertujuan memperoleh data visual kawasan studi, wawancara bertujuan memperoleh informasi dari para informan kunci dan observasi lapangan digunakan untuk memperoleh data perilaku manusia.

Pembahasan dilakukan dengan analisis komparatif mengenai kondisi di lapangan dan studi pustaka terkait pengembangan komunitas di sebuah kawasan. Analisis komparatif bertujuan mengidentifikasi partisipasi warga dalam pembangunan lingkungan dan permukimannya, terikat hal-hal apa saja yang telah dilakukan warga kampung Gampingan serta kendala-kendala dalam pengelolaan lingkungan kampung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penurunan Kualitas Ruang Kampung di Kota Yogyakarta, menunjukkan situasi yang mengkhawatirkan. Dalam pembangunan yang berkelanjutan, lingkungan kota cenderung berkembang secara ekonomis, tetapi menurun secara ekologis. Perkembangan sarana dan prasarana fisik jauh meninggalkan kebutuhan ekologis kota. Dinamika kehidupan perkotaan semakin kompleks dan fisik perkotaan terus dipadati bangunan, permukaan diperkeras yang menyebabkan ruang hijau terus menyempit.

Akibat kondisi ini kualitas kawasan semakin menurun, terjadi perubahan fungsi kawasan dan degradasi kualitas lingkungan. Perubahan fungsi kawasan ini juga terjadi pada kampung kota yang merupakan cikal-bakal kehidupan perkotaan. Di Yogyakarta, perencanaan kota pada awalnya sudah dirancang dengan cukup baik. Keraton dan alun-alun sebagai pusatnya dan kampung tumbuh di sekitarnya. Sampai saat ini kampung-kampung masih tetap bisa bertahan walaupun dalam perkembangan waktu kondisinya semakin terhimpit oleh modernitas.

Di balik ketidakseragaman kampung, sebenarnya dapat ditemukan *surprising things*, hal-hal unik di luar kreativitas arsitek sekalipun. Lebih dari sekedar aspek fisik, kampung merupakan sistem sosial yang kompleks. Kampung merupakan wadah pengembangan prinsip-prinsip keberagaman dan toleransi. Hal-hal seperti itulah yang mungkin tidak ditemukan pada permukiman modern, yang cenderung individualistis.

Di kota Yogyakarta kampung juga tumbuh di sekitar bantaran sungai, maka diperlukan perlakuan yang berbeda dalam menjaga eksistensi kampung. Problema krusial adalah, bagaimana warga dapat hidup berdampingan dengan sungai, sehingga kondisi lingkungan sungai tetap terjaga dan kehidupan warga kampung terus berjalan dengan baik.

Fenomena yang sering terjadi adalah masyarakat yang tinggal di bantaran sungai sering kali dianggap sebagai penyebab timbulnya masalah penurunan kualitas lingkungan sungai. Paradigma semacam itu terkadang membawa dan menentukan pola penyelesaian masalah yang cenderung instan. Pola penyelesaian instan ini terkadang menganggap masyarakat tidak perlu dilibatkan untuk menentukan solusi penyelesaian masalah. Metode atau alat yang digunakan untuk menyelesaikan masalah datang dan dibawa oleh “pihak luar” dalam waktu singkat, tanpa melibatkan atau melewati proses diskusi dan proses pengambilan keputusan yang dihasilkan bersama masyarakat.

Cara-cara penyelesaian masalah berpola *top-down* justru menimbulkan permasalahan baru. Contohnya, beberapa fasilitas rekreatif yang awalnya dibangun dengan tujuan memperbaiki kualitas lingkungan mengalami kerusakan dan dibiarkan terbengkalai, tidak dapat dioperasikan lagi karena kurang melibatkan warga. Kejadian ini akibat dari kurang rasa memiliki atau rasa tanggung jawab warga masyarakat untuk terlibat menjaganya. Akibatnya, timbul permasalahan lain karena tidak adanya keberlanjutan dalam perbaikan kualitas lingkungan yang telah dikerjakan.

Menurut Badan Lingkungan Hidup (BLH) kota Yogyakarta, dalam mengelola lingkungan kampung, masyarakat ditempatkan sebagai *center* (masyarakat sebagai subyek). Dengan demikian, masyarakat secara berkesinambungan mendapatkan pengetahuan, pemahaman, dan *skill* baru. Pemecahan permasalahan lingkungan dengan melibatkan masyarakat artinya, masyarakat terlibat dalam beberapa kegiatan:

1. Proses penyelesaian masalah
2. Tahap perencanaan

3. Pemilihan alternatif penyelesaian masalah
4. Penerapan
5. Perawatan

Pendekatan berbasis masyarakat meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap proses rekonstruksi karena penerima manfaat mengambil tanggung jawab dalam merekonstruksi kehidupan mereka.

Aksi Partisipatif Warga dalam Mengelola Kampung Berbasis Kearifan Lokal, tidak harus selalu membutuhkan biaya besar dan dengan bahan baku yang sulit didapatkan. Kearifan lokal suatu kelompok masyarakat di suatu wilayah dapat digali dan diterapkan sebagai metode alternatif. Memulainya dengan mencari tahu apa yang masyarakat punya dan apa yang masyarakat ketahui lewat diskusi-diskusi kelompok bersama masyarakat. Proses ini memang membutuhkan waktu dan ketekunan.

Melalui konsep kearifan lokal, warga kampung Gampingan khususnya RT 46/RW 10 yang diketuai oleh Ibu Ana Yuliantanti berupaya untuk mengelola lingkungan mereka yang terletak di tepi Sungai Winongo. Tujuan mereka menjadikan Sungai Winongo sebagai bagian dari kehidupan warga. Konsep kearifan lokal dilakukan dengan mengangkat potensi lokal kampung. Ibu Ana Yuliantanti melihat, sungai dan masyarakat sebenarnya memiliki potensi yang baik jika dikelola dengan baik pula.

Dalam setiap usahanya, Ibu Ana Yuliantanti selalu melibatkan partisipasi warga. Harapannya

agar rasa memiliki warga terhadap lingkungannya tumbuh karena dilibatkan dalam proses pengelolaan kampung. Beberapa langkah partisipasi warga yang sudah ditempuh Ibu Ana Yuliantanti dan warganya dalam tabel.

Prinsip Pengembangan kelembagaan pembangunan berbasis masyarakat (Nasdian, 2006) yang digunakan dirinci dalam tulisan ini menggunakan kriteria sebagai berikut:

1. Mendorong pembangunan ekonomi komunitas yang memiliki fokus sesuai kapasitas ruang dan potensi komunitas.
2. Memfasilitasi munculnya pusat-pusat pertumbuhan antar komunitas.
3. Memberdayakan komunitas agar dapat menggali, mendayagunakan dan melestarikan potensi-potensi yang ada untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat komunitas.
4. Mendorong usaha-usaha ekonomi rakyat yang memiliki link yang kuat dengan basis dan potensi kawasan perkomunitasan dan memfasilitasi akses produksi usaha rakyat terhadap pasar.
5. Mengembangkan kapasitas manajemen usaha ekonomi rakyat dan kelembagaan keuangan mikro kawasan perkomunitasan.
6. Memfasilitasi penguatan partisipasi pemerintah komunitas dan kelembagaan masyarakat komunitas serta masyarakat dalam proses kebijakan publik lokal dalam kaitannya dengan pembangunan dan pengembangan kawasan bantaran sungai.

Tabel Kegiatan Pengelolaan Kampung Berbasis Masyarakat sesuai Kriteria (Nasdian, 2006)

No	Prinsip Pengembangan kelembagaan pembangunan berbasis masyarakat (Nasdian, 2006)	Langkah Warga Kampung Gampingan
1	Mendorong pembangunan ekonomi komunitas yang memiliki fokus sesuai kapasitas ruang dan potensi komunitas	Fokus pengelolaan lingkungan di kampung ini adalah untuk meningkatkan potensi masyarakat dan Sungai Winongo sebagai bagian dari kehidupan kampung. Langkah yang dilakukan warga kampung ini adalah dengan bank sampah. Bank sampah berguna untuk mengurangi sampah yang dihasilkan warga yang terbiasa membuangnya

No	Prinsip Pengembangan kelembagaan pembangunan berbasis masyarakat (Nasdian, 2006)	Langkah Warga Kampung Gampingan
		<p>di Sungai Winongo. Modelnya adalah warga menyeter sampah rumah tangganya. Kemudian hasil setorannya dapat diambil pada tiap bulannya. Walaupun tidak seberapa, kini warga tahu ternyata sampah juga memiliki manfaat. Pengelolaan sampah yang baik dapat memberi pemasukan tambahan bagi warga. Dengan model seperti ini, lingkungan sungai menjadi lebih terawat, sampah berkurang, dan meningkatkan kesejahteraan warga.</p>  <p>Sumber: http://bsmigunani-gampingan.blogspot.com/</p>
2	<p>Memfasilitasi munculnya pusat-pusat pertumbuhan antar komunitas</p>	<p>Dari beberapa langkah yang dilakukan warga, maka muncul komunitas sebagai berikut:</p> <p>Bank Sampah “Migunani” Komunitas ini merupakan gerakan masyarakat untuk menjaga lingkungan. Awalnya komunitas ini hanya merupakan kelompok kecil yang cemas terhadap kondisi Sungai Winongo yang semakin rusak. Bermula dari ini kelompok kecil ini mulai menyosialisasikan kepada warga. Langkah memilah sampah ditempuh dengan swadaya tanpa meminta bantuan dari pемangku kepentingan, karena menurut warga hal yang terpenting adalah perubahan perilakunya.</p> <p>Sumber: http://bsmigunani-gampingan.blogspot.com/</p> <p>Komunitas seni-budaya “Kridho Budaya” Ibu Ana melihat bahwa generasi muda saat ini cenderung mengalami penurunan kualitas jika tidak didampingi dengan baik. Bersama penggiat seni-budaya di kampung ini, berupaya untuk menjaga, mendidik, dan mengembangkan</p>

No	Prinsip Pengembangan kelembagaan pembangunan berbasis masyarakat (Nasdian, 2006)	Langkah Warga Kampung Gampingan
		<p>potensi generasi muda dengan menggunakan ruang kampung, yaitu bantaran sungai. Ruang bantaran sungai yang sudah berubah kondisinya, dijadikan sebagai ruang bersama khususnya untuk komunitas ini. Dengan perlakuan seperti ini, secara tidak langsung mendidik warga untuk senantiasa menjaga kebersihannya. Perubahan fungsi ruangan dapat juga mengubah perilaku warga.</p>  <p>Sumber: Dokumentasi Penulis</p>
3	<p>Memberdayakan komunitas agar dapat menggali, mendayagunakan dan melestarikan potensi-potensi yang ada untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat komunitas</p>	<p>Salah satu cara untuk tetap menjaga konsistensi perilaku ini adalah dengan meneruskan pada generasi muda dan anak-anak. Namun cara ini dikenalkan dengan cara yang lebih sederhana yaitu pada komunitas seni-budaya. Generasi budaya diajak untuk berkesenian sekaligus sebagai kader penerus.</p>  <p>Sumber: Dokumentasi Penulis</p> <p>Proses yang lebih dalam lagi adalah kini warga mulai mengelola sampah organik bahwa sampah tidak hanya dapat dijual saja, tapi bisa dimanfaatkan oleh lingkungan kampung juga. Sampah organik dikelola menjadi kompos untuk kebun di kampung. Beberapa bibit tanaman juga telah diberikan oleh BLH kota Yogyakarta karena apresiasinya terhadap usaha warga.</p>

No	Prinsip Pengembangan kelembagaan pembangunan berbasis masyarakat (Nasdian, 2006)	Langkah Warga Kampung Gampingan
		<p>Namun hal ini belum sepenuhnya berjalan karena warga belum terlalu merasakan manfaatnya. BLH juga mengusulkan bahwa kampung ini dijadikan sebagai "Kampung Sayur" namun hal ini juga belum dapat sepenuhnya terlaksana.</p> <p>Festival Winongo Asri Adalah salah satu kegiatan bekerja sama dengan FKWA dan warga kampung sekitar. Hal ini bertujuan untuk semakin menyuarakan bahwa pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.</p>  <p>Sumber: Dokumentasi Penulis</p>
4	<p>Mendorong usaha-usaha ekonomi rakyat yang memiliki link yang kuat dengan basis dan potensi kawasan perkomunitasan dan memfasilitasi akses produksi usaha rakyat terhadap pasar</p>	<p>Bank sampah bekerja sama dengan pengepul sampah lainnya sehingga sampah bernilai ekonomi lebih tinggi Menjalinkan kerja sama dengan kampung seberang sungai, yaitu Ngampilan untuk pengelolaan bersama. Bahwa jika ada sungai yang melintas, pelestariannya menjadi tanggung jawab bersama.</p>
5	<p>Mengembangkan kapasitas manajemen usaha ekonomi rakyat dan kelembagaan keuangan mikro kawasan perkomunitasan</p>	<p>Pengelolaan bank sampah dengan struktur organisasi yang jelas, di bawah RW dan dengan kontrol rutin dari BLH. Pembagian keuangan yang jelas (80% untuk warga dan 20% untuk pengurus dan operasional).</p>  <p>Sumber: http://bsmigunani-gampingan.blogspot.com/</p> <p>Sisa Hasil Usaha (SHU) digunakan untuk pendanaan kegiatan komunitas budaya "Kridho Budaya" dan <i>event</i> tahunan seperti Festival</p>

No.	Prinsip Pengembangan kelembagaan pembangunan berbasis masyarakat (Nasdian, 2006)	Langkah Warga Kampung Gampingan
		<p>Winongo, kegiatan seni-budaya.</p>  <p>Sumber: http://jogjatoday.com/2014/11/23/festival-winongo-2014/</p>
6	<p>Memfasilitasi penguatan partisipasi pemerintah komunitas dan kelembagaan masyarakat komunitas serta masyarakat dalam proses kebijakan publik lokal dalam kaitannya dengan pembangunan dan pengembangan kawasan bantaran sungai</p>	<p>Penguatan kegiatan ini dilakukan dengan menjalin dukungan Badan Lingkungan Hidup (BLH) kota Yogyakarta. BLH merespon positif terhadap usaha warga kampung Gampingan ini yang dengan swadaya merintis tanpa meminta bantuan terlebih dahulu.</p> <p>Selain itu, setiap usaha ini tidak lepas dari kerja sama dengan Forum Komunikasi Winongo Asri (FKWA). FKWA merupakan wadah komunikasi bagi warga di sekitar bantaran sungai Winongo yang bersama warga terus mencintai sungai. Salah satu kegiatan rutinnnya adalah Festival Winongo. Dalam kegiatan ini lekat dengan kegiatan budaya dan selalu menyediakan ruang dialog antar warga dan pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun pihak swasta.</p> <p>Ditambah juga dukungan dari Pemerintah Kota Yogyakarta untuk pengembangan kampung. Usaha swadaya masyarakat ini membuat pemerintah juga turut berpartisipasi dengan memberi bantuan pembangunan kampung, salah satunya talud, agar tercipta ruang aktivitasn dan ruang terbuka publik di sekitar bantaran sungai.</p>  <p>Sumber: Dokumentasi Penulis</p>

KESIMPULAN

Proses pengelolaan kampung berbasis kearifan lokal ini memang tidak mudah untuk dilakukan. Di kampung Gampingan sendiri, sampai saat ini proses masih terus berjalan dan terus menerus dilakukan pembenahan. Butuh waktu yang panjang untuk mengubah perilaku warga. Beberapa kendala beberapa hal mungkin sudah dapat dikatakan berhasil, namun beberapa hal juga masih menghadapi tantangan dan perlu usaha lebih keras lagi.

Tentunya pengelolaan lingkungan ini tidak dapat berjalan sendiri. Hal yang menjadi pokok di kampung Gampingan adalah partisipasi masyarakat. Namun juga diperlukan model kemitraan antara komunitas lain, pihak pemerintah dan swasta terkait, dan perguruan tinggi tentunya dengan menempatkan masyarakat sebagai pembuat keputusan. Selain itu juga diperlukan peran serta para fasilitator yang memiliki peran sebagai penggerak.

Dari hubungan kemitraan haruslah tetap menempatkan secara penuh kepercayaan pada masyarakat untuk dapat mengambil keputusan yang tepat yang nantinya akan berdampak pada kehidupan mereka sehari-hari dan lingkungan sekitar. Masyarakat sebenarnya yang mengetahui lokalitasnya sehingga dengan melibatkan mereka tentunya akan ditemukan solusi yang sesuai akan masalah, perencanaan, pemilihan alternatif penyelesaian, penerapan, dan perawatannya sehingga pengelolaan lingkungan tetap akan lestari dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada warga kampung Gampingan yang telah melibatkan penulis dalam membangun kampung, dan khusus kepada Ibu Ana Yuliantanti dan Bapak Nowo, teman-teman Krido Budaya, dan Bank Sampah Migunani.

DAFTAR PUSTAKA

Ernawi, I. 2009. Kearifan Lokal dalam Perspektif Penataan Ruang. Kearifan Lokal

Dalam Perencanaan dan Perancangan Kota; Untuk Mewujudkan Arsitektur Kota yang Berkelanjutan. Laboratorium Kota & Permukiman. Jurusan Teknik Arsitektur Universitas Merdeka Malang.

Suminar, S.S, Christine S.W dan Hartono, 2011, Strategi Penyusunan Pola Tata Komunitas Berbasis Partisipasi Masyarakat Bantaran Sungai Winongo (Studi Kasus di Kelurahan Wirobrajan dan Notoprajan Kota Yogyakarta) dalam Jurnal Penelitian Bappeda Kota Yogyakarta Vol.6 April 2011.

Nasdian, F, T. 2006. Pengembangan Masyarakat dan Kelembagaan Pembangunan. Bogor: Penerbit IPB.

Nasdian, F, T. 2006. Sosiologi untuk pengembangan Masyarakat. Bogor: Penerbit IPB.

Saharudin. 2006. Perencanaan Partisipatif. Bogor: Penerbit IPB.

Wikantoyoso, R. 2009. Prawacana Local Wisdom: Kearifan Lokal Dalam Perencanaan dan Perancangan Kota; Untuk Mewujudkan Arsitektur Kota yang Berkelanjutan. Malang: Laboratorium Kota & Permukiman. Jurusan Teknik Arsitektur Universitas Merdeka Malang.